



KABUPATEN SIDOARJO

2020



**Policy  
Brief**

**PENYUSUNAN  
INDEKS GOOD  
GOVERNANCE  
KAB. SIDOARJO**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Sidoarjo

## Ringkasan Eksekutif

Indeks *Good Governance* merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat tata kelola pemerintahan di suatu daerah. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab. Untuk itu, diperlukan adanya pengukuran tingkat *Good Governance*. Dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 – 2021, Indeks *Good Governance* (IGG) menjadi salah satu indikator penting Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dalam lima tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2016 – 2021, IGG ditargetkan terus meningkat dari 65,35 pada tahun 2016 menjadi 70,76 pada tahun 2021. Pada tahun 2020, IGG Kabupaten Sidoarjo mencapai 77,78 dengan kategori baik. Selain indikator penyusun IGG, SPIP, SAKIP, dan Pengelolaan keuangan daerah juga mempengaruhi *good governance* secara langsung.

## Latar Belakang

*Good Governance* atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang

berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai pasca krisis multidimensi, seiring dengan tuntutan era reformasi. Dalam konteks Indonesia yang bergeliat dengan tuntutan reformasi, *Good Governance* hadir sebagai model transplantatif baru yang diyakini mampu mengobati birokrasi politik yang dinilai sarat korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia<sup>1</sup>

Berlakunya otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan daerah, membuat perubahan yang sangat mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab. Untuk itu, diperlukan adanya pengukuran tingkat *Good Governance*.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, Pemerintah Kabupaten

---

<sup>1</sup> Prianto, A. L. (2011). *Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Sidoarjo sebagai bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia memiliki tekad untuk melaksanakan sistem pemerintahan berbasis prinsip Good Governance. Dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 – 2021, Indeks Good Governance (IGG) menjadi salah satu indikator penting Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dalam lima tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2016 – 2021, IGG ditargetkan terus meningkat dari 65,35 pada tahun 2016 menjadi 70,76 pada tahun 2021.

## Metodologi

Dalam mendapatkan data primer, dilakukan survei dengan menentukan populasi dan sampel terlebih dahulu. Populasi dalam Penyusunan Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 adalah jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang berusia 15 tahun hingga 64 tahun (usia produktif). Berdasarkan data LAKIP 2019, jumlah penduduk Kabupaten

Sidoarjo usia 15 – 64 tahun sebanyak 1.643.629 jiwa. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan purposive sample dengan metode pengambilan sampel dengan Tabel Morgan and Krejcie. Didapatkan sampel sebanyak 384 masyarakat di mana dibagi menjadi; Birokrasi (18 responden); Masyarakat Ekonomi/Perusahaan (40 responden); Masyarakat (344 responden).

## Hasil Penelitian

Kondisi pemerintahan Kabupaten Sidoarjo selalu diharapkan adanya peningkatan kinerja. Hal ini dikaitkan dengan fungsi pemerintah sebagai pengawas koordinasi proses pembangunan yang dijalankan. Pada tahun 2020, Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 ditargetkan sebesar 69,55. Berdasarkan hasil survei dan analisis yang telah dilakukan pada 8 (delapan) prinsip dan indikator-indikator yang telah dirumuskan, didapatkan hasil yang disajikan pada Tabel 1.

No	Prinsip Indeks <i>Good Governance</i>	Indeks	Keterangan
1	Prinsip Taat Hukum	79,11	Baik
2	Prinsip Partisipasi	76,65	Baik
3	Prinsip Transparansi	78,28	Baik
4	Prinsip Akuntabilitas	77,38	Baik
5	Prinsip Daya Tanggap	76,03	Baik
6	Prinsip Kesenjangan	78,83	Baik
7	Prinsip Efektivitas dan Efisiensi	77,57	Baik
8	Prinsip Visi Strategis	78,44	Baik
<b>Indeks <i>Good Governance</i></b>		<b>77,78</b>	<b>Baik</b>

Setelah dibahas tiap-tiap prinsip, maka dapat diketahui bahwa masing-masing prinsip memberikan pengaruh dan kontribusi tersendiri terhadap Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo tahun 2020.

1. Ketaatan Hukum, yang meliputi kualitas pelaksanaan penegakan hukum dan ketersediaan dasar hukum yang ada di daerah.
2. Partisipasi, yang meliputi intensitas kualitas keterlibatan masyarakat

dalam perumusan kebijakan di daerah dan keterlibatan masyarakat dalam memonitor penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Transparansi, yang meliputi ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi publik dan ketersediaan informasi untuk dipublikasikan kepada publik.
4. Akuntabilitas, yang meliputi akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pertanggung jawaban kinerja.
5. Daya tanggap, yang meliputi ketersediaan dan kejelasan media/forum pengaduan dan kecepatan dan ketepatan pemerintah daerah dalam menghadapi pengaduan dan tindakan terhadap pengaduan
6. Kesetaraan, yang meliputi ketersediaan jaminan semua orang untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah dan kualitas pemberian pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah.
7. Efektivitas dan efisiensi, yang meliputi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
8. Visi Strategis, yang meliputi kejelasan arah Rencana Pembangunan Daerah dan konsistensi kebijakan untuk mewujudkan visi-misi.

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat faktor eksternal yang diduga berpengaruh terhadap *good governance*

seperti SPIP, SAKIP, dan pengelolaan keuangan, serta pemberdayaan masyarakat.

## Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil analisis Indeks Kebahagiaan Hidup Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indeks Good Governance di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 sebesar 77,78 yang termasuk kategori baik. Nilai tersebut naik sebesar 3,54 poin atau sekitar 4,77 persen dari tahun sebelumnya. Prinsip dengan indeks tertinggi adalah Prinsip Taat Hukum dan yang paling rendah adalah Prinsip Daya Tanggap.
2. Capaian Indeks Good Governance dimensi pemerintah di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 sebesar 84,05. Prinsip dengan nilai paling tinggi adalah Prinsip Taat Hukum dan yang paling rendah adalah Prinsip Partisipasi.
3. Capaian indeks Good Governance dimensi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 sebesar 78,26. Prinsip dengan indeks tertinggi adalah Prinsip Taat Hukum dan yang paling rendah adalah Prinsip Daya Tanggap.
4. Capaian indeks Good Governance dimensi swasta di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 sebesar 79,01. Prinsip dengan indeks tertinggi adalah Prinsip Taat Hukum dan yang paling rendah adalah Prinsip Partisipasi.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Good Governance di Kabupaten Sidoarjo pada tahun





2020 adalah ketaatan hukum, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, dan visi strategis. Selain hal tersebut, SPIP, SAKIP, dan pengelolaan keuangan daerah juga mempengaruhi good governance secara tidak langsung. Semakin baik pengelolaan keuangan daerah, SPIP, dan SAKIP, maka dinilai good governance akan semakin baik. Selain faktor-faktor tersebut, hubungan masyarakat dan pemerintah yang intensif juga mempengaruhi good governance secara tidak langsung.

6. Jika dilihat perkembangannya, indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo cenderung memiliki tren meningkat yang menunjukkan bahwa penilaian masyarakat dan stakeholder lain terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo semakin baik.

### Rekomendasi

Berikut adalah rekomendasi-rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil analisis sebagai berikut:

1. Lembaga atau OPD perlu meningkatkan publikasi tentang pelayanan pengaduan, pelayanan publik, dan mekanisme-mekanisme yang memudahkan masyarakat atau stakeholder turut dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu memastikan bahwa hasil forum koordinasi antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Sidoarjo tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat turut mengawasi jalannya pemerintahan berdasarkan hasil rencana pembangunan.
3. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang data-data APBD Kabupaten Sidoarjo seperti informasi situs yang memuat data-data tersebut sehingga masyarakat juga mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan di Kabupaten Sidoarjo.
4. Pemerintah daerah dalam hal ini OPD, masyarakat, dan pihak swasta (industri dan UMKM) diharapkan dapat berkontribusi dalam perumusan Perda - Perda yang mengatur dunia usaha. Sebab, Perda - Perda ini dikemudian hari akan sangat memberikan dampak pada kehidupan masyarakat luas, terutama masyarakat dan pihak swasta. Sehingga dengan keterlibatan ketiga pihak yang berperan dalam Good Governance diharapkan dapat mengurangi dampak buruk yang dapat muncul di kemudian hari.
5. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan evaluasi tentang SOP pelayanan publik secara berkala sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat melakukan penyesuaian dalam Pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan dengan metode yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini serta RPJMD yang berlaku

